

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Otonomi daerah itu sendiri resmi dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 januari 2001. Tujuan diadakannya otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilisas nasional dan pemerataan pendapatan. Kebijakan otonomi daerah dicananangkan agar mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing (Nugroho,2003).

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut di akibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Selain itu, tidak dapat di pungkiri bahwa pembangunan ini hanya terkonsentrasi di daerah pusat saja dan kurang memperhatikan daerah

pendukung. Agar pembangunan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah. (Putra Fajar Utama,2010).

Pembangunan ekonomi dalam konteks regional, pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan berbagai masalah lainnya.

Permasalahan tersebut dalam proses pembangunan dapat di atasi dengan menentukan kebijakan dan program pembangunan tertentu seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta program pembangunan lainya yang disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan dari masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangun daerah dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka daerah akan berusaha mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai keunggulan daerah. Keunggulan sektor ekonomi daerah ini di prioritaskan dan dikembangkan, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau ekspor yang tinggi yang akan berdampak bagi peningkatan perekonomian daerah tersebut. Hal ini terjadi apabila biaya produksi rendah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Daya saing suatu daerah dapat di ketahui melalui proses perdagangan antar daerah (inter regional) maupun internasional, sehingga dalam jangka panjang sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing yang akan menjadi spesialisasi dan andalan daerah. Selain

itu, pembangunan tidak dapat mengabaikan masalah pertumbuhan ekonomi, oleh karena pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian agar pertumbuhan menjadi seiring dengan pemerataan regional, maka setiap daerah harus memiliki spesialisasi sektoral sesuai dengan keunggulan sumber daya yang dimiliki, dan ini harus diikuti oleh kebijakan ekonomi regional dari pemerintah pusat untuk mengatasi kemungkinan kesenjangan antar daerah kaya dan daerah miskin. Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan ekonomi Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>
2012	7,52
2013	7,2
2014	6,81
2015	6,63
2016	6,74

*Sumber : PDRB NTT Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2012 -2016*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kota Kupang cenderung fluktuatif, misalnya pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi di kota kupang sebesar 7,52% persen, di tahun 2013 menurun menjadi 7,2% persen, kemudian pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 6,81% persen, pada tahun 2015 masih terus menurun menjadi 6,63% persen dan pada tahun 2016 naik menjadi 6,74%.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Perkapita Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB Perkapita ( juta)</b>
2012	2.362.096
2013	2.410.263
2014	5.522.927
2015	6.077.100
2016	7.361.774

*Sumber : PDRB NTT Menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2012 -2016*

Sedangkan PDRB perkapita kota kupang selalu meningkat setiap tahunnya, misalnya pada tahun 2012 PDRB kota Kupang berjumlah 2.362.096 juta, meningkat menjadi 2.410.263 di tahun 2013, terus meningkat menjadi 5.522.927 di tahun 2014 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 6.077.100, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 7.361.774.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang di tandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di revisi menjadi Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta di berlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di revisi menjadi Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Mudrajad Kuncoro,2004).

Konsekuensi dari hal tersebut, di harapkan masing-masing daerah mampu berusaha sendiri untuk meningkatkn pendapatannya, maka panggilan dan penggunaan potensi daerah yang tepat merupakan jalan terbaik, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif. Akan tetapi hal ini tergantung pada masing-masing daerah, dikarenakan antar

daerah mempunyai sektor-sektor unggulan atau sektor basis yang berbeda satu dengan yang lain.

Aktivitas dalam perekonomian regional di golongan dalam dua sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat yang berada dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan basis mempunyai peran penggerak dalam utama dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dimana setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap perekonomian regional (John Glasson,1977).

Kota Kupang tentunya mempunyai potensi ekonomi di berbagai sektor yang nantinya akan di kembangkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Dari PDRB Tahun 2012-2016 di Kota Kupang, PDRB Tahun 2016 adalah yang paling tertinggi, sedangkan yang paling rendah adalah PDRB Tahun 2012. Nilai tambah berbagai sektor ekonomi tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto Kota Kupang atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2016 yang di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kupang Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016**

NO	Lapangan usaha/sector	PDRB Kota Kupang				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian	252.253,6	264.655,0	279.088,6	297.386,3	308.255,2
2	Pertambangan & penggalian	12.347,7	12.857,3	13.263,7	13.704,7	14.475,7
3	Industri Pengolahan	173.123,6	182.654,3	191.126,8	200.885,6	213.263,8
4	Listrik, Gas, & Air Bersih	10.693,9	11.589,4	14.790,7	17.277,7	20.079,6
5	Bangunan / Konstruksi	1.734.647,6	1.834.624,0	1.943.105,1	2.063.869,1	2.218.612,9
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	1.618.468,6	1.763.327,2	1.858.859,5	1.979.027,6	2.123.941,9
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.514.302,3	1.591.951,1	1.749.829,7	1.906.055,9	2.021.740,7
8	Keuangan, Persewaan & Perusahaan	701.298,2	788.647,1	881.485,6	947.661,1	1.050.890
9	Jasa-jasa	402.044,4	433.595,4	460.616,1	484.970,2	506.458,4
<b>PDRB</b>		6.419.179,9	6.883.900,8	7.392.165,8	7.937.838,2	8.477.718,2

*Sumber: PDRB NTT menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2012-2016*

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada empat sektor utama yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang yaitu Sektor Bangunan/ Konstruksi. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sedangkan sektor yang paling kecil peranannya dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Sektor Unggulan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Perkapita Di Kota Kupang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun beberapa topik yang penulis ambil sebagai rumusan masalah dalam penulisan proposal ini yakni:

1. Apa saja sektor unggulan di Kota Kupang?
2. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Kota Kupang berdasarkan Klassen Tipology?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Kota Kupang.

Sedangkan manfaat dari penelitian proposal ini yakni:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk di pertimbangkan dalam mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan, pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.